



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARWAN
2. Jabatan : SANDIMEN AHLI MADYA
3. NHK : 700786

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	200.060.000
III. HUTANG	Rp.	129.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	70.260.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ECHMOND
2. Jabatan : STATISISI AHLI MUDA
3. NHK : 698912

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 237.450.000

1. MOBIL, DAIHATSU F601 RV-GMDFJJ XENIA FAMILY VVTI Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA NC12AF2CBI A/T VARIO SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11B A/T / SCOOT BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.450.000
4. MOBIL, TOYOTA B401RA-GMZFI (CALYA 1.2 G M/T) MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.110.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 259.600.000

III. HUTANG Rp. 248.333.740

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 11.266.260

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HENDRIKUS MANGIRI**
2. Jabatan : **STATISISI AHLI MUDA**
3. NHK : **685778**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 415.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 298.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 29.400.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 164.387.257**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 906.787.257**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 906.787.257**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INTJE YUSUF
2. Jabatan : PRANATA HUMAS AHLI MUDA
3. NHK : 863129

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/139 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 42.204

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 505.042.204

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 505.042.204

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. IRFAN ABD RAUF
2. Jabatan : PRANATA HUMAS AHLI MUDA
3. NHK : 768545

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 459 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	88.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2000, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	593.000.000

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **593.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JONI ABD. RAHMAN
2. Jabatan : PRANATA HUMAS AHLI MUDA
3. NIK : 768530

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 206.000.000

1. Tanah Seluas 412 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 206.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 23.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 52.837.794

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 281.837.794

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 281.837.794

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD AFFAN
2. Jabatan : PRANATA HUMAS AHLI MUDA
3. NHK : 545186

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 281.000.000

1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SIDEKICK Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 75.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 756.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 756.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURELI**
2. Jabatan : **STATISISI AHLI MUDA**
3. NHK : **486624**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 560.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 421 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 998 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 116.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125 TR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ETIOS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 100.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 115.318.186**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 85.000.000**

Sub Total **Rp. 976.318.186**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 976.318.186**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRESYTA EKA PUTRI
2. Jabatan : MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA
3. NHK : 672101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/17 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ETIYOS SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 138.255.723

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 592.255.723

III. HUTANG Rp. 116.897.109

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 475.358.614

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REGGY HARIANTO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
3. NHK : 669249

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	11.000.000
1. MOTOR, YAMAHA RX KING 135 Tahun 2002, HASIL SENDIRI	Rp.	4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SPORTY Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	7.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000
Sub Total	Rp.	11.075.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.075.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RISNAWATY**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**
3. NHK : **209958**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 183.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
2. Tanah Seluas 339 m2 di KAB / KOTA SIGI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 31.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 145.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
4. MOBIL, DAIHATSU MOBIL BARANG PICKUP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 83.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 50.200.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 461.700.000**

III. HUTANG **Rp. 160.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 301.700.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIZAL LANDJOMA
2. Jabatan : MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA
3. NHK : 691726

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	400.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	350.400.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	350.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SILVANA MARYANI YANIS
2. Jabatan : PRANATA HUMAS AHLI MUDA
3. NHK : 716009

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.778.599

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 353.778.599

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 353.778.599

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TAMRIN AHMAD**
2. Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANAAN**
3. NHK : **486617**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 302 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 893 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 1580 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 84.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI STRADA DOUBLE KABIN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 2.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 72.781.566**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 2.108.781.566**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 2.108.781.566**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.